

e-news letter

DES II 2019

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si

Utang Indonesia sudah di Level **BAHAYA**

38.2%: 119,29

51.25%: 108.98

61.6%: 99,19

86.72



Utang Indonesia sudah di level **BAHAYA**

Surat utang Indonesia dalam bentuk rupiah dipegang oleh pihak asing sangat besar sampai 39 persen. Terbesar diantara negara-negara *emerging market* yang rata-rata 25 persen. Dan ini harus menjadi indikator bahwa utang kita sudah pada level yang membahayakan

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI



Wartawan Harus Netral dalam Pemberitaan

Dalam hal ini diperlukan netralitas dan kemerdekaan pers yang tidak memihak pada siapapun, termasuk pada calon kepala daerah.

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (06/12) — Anggota DPR RI Komisi 1 Thoriq Hidayat menyampaikan apresiasi apa yang telah disampaikan oleh Dewan Pers.

"Wartawan adalah pihak yang rentan terpapar dengan hoaks dan berita negatif, hanya integritas dan kode etik jurnalistik yang bisa mencegah" kata Thoriq.

Anggota DPR RI dari PKS ini menjelaskan dalam hal ini, bingkai moral menjadi hal yang sangat penting.

"Mudah-mudahan hal ini menjadi "ruh" bagi semua pihak, sehingga wartawan bisa menyajikan informasi yang benar dan dapat menjadi penyambung lidah bagi siapapun", lanjutnya.

Dewan Pers merupakan sebuah Lembaga independent yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, dan diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dewan Pers memiliki fungsi antara lain: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan

mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.

Thoriq Hidayat menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada Pilkada serentak di berbagai daerah.

"Dalam hal ini diperlukan netralitas dan kemerdekaan pers yang tidak memihak pada siapapun, termasuk pada calon kepala daerah. Netralitas wartawan ini menjadi sesuatu yang penting dan jangan sampai dicerai oleh oknum tertentu", lanjutnya.

Untuk itu, Thoriq menegaskan bahwa Dewan Pers perlu mengupayakan adanya peningkatan sumber daya manusia pers.



Maju Sebagai Bacalon Kepala Daerah, Anak dan Menantu Presiden Mesti Sabar Menunggu



Jakarta (11/12) — Kabar majunya Gibran dan Bobby Nasution, sebagai calon kepada daerah kota Solo dan Medan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena keduanya merupakan anak dan menantu Presiden Jokowi. Surahman Hidayat anggota Fraksi PKS DPR RI komisi 2, berharap keduanya mengurungkan niatnya untuk maju sebagai calon kepala daerah.

lebih lanjut Surahman berharap, presid

en Jokowi tidak mengizinkan keduanya untuk maju mengikuti konstalasi pilkada.

"Pak Jokowi memberikan teladan dan meninggalkan legacy yang baik, ketika berhasil membujuk anak dan menantunya mengurungkan keinginannya", ungkapnya.

Menurut Surahman Hidayat, Gibran maupun Bobby Nasution merupakan sosok muda potensial yang bisa menjadi warna positif dalam perpolitikan di Indonesia.

Namun waktunya belum tepat bagi mereka untuk maju ke gelanggang politik saat ini. Surahman khawatir muncul anggapan aji mumpung bila keduanya tetap mencalonkan diri.

"Kita perlu menghindari bayang-bayang aji mumpung dan godaan eksploitasi kekuatan orang tua," tegas Surahman.

Surahman Hidayat lebih lanjut menilai, majunya

Silahkan keduanya maju setelah pak Jokowi selesai menjalankan amanat sebagai presiden. Kita perlu membangun sistem beretika, yang tidak meninggalkan celah terjadinya abuse of power, dan menghindari godaan membangun dinasti yang berpotensi terjadinya KKN

Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA

Anggota Komisi II DPR RI

a Gibran dan Bobby Nasution menimbulkan kegelisahan sebagian masyarakat atas munculnya dinasti politik baru.

"Silahkan keduanya maju setelah pak Jokowi selesai menjalankan amanat sebagai presiden. Kita perlu membangun sistem ber-etika, yang tidak meninggalkan celah terjadinya abuse of power, dan menghindari godaan membangun dinasti yang berpotensi terjadinya KKN", terangnya.

Menurut konstitusi, semua rakyat Indonesia memiliki hak

memilih dan di pilih. Tidak boleh ada yang membatasi siapapun untuk menjadi pemimpin bangsa ini, karena semua rakyat memiliki hak yang sama. Namun kita perlu membangun etika politik, sebagai upaya memantangkan demokrasi Indonesia.

Ketua FPKS Instruksikan Anggotanya di Komisi III Kawal Kasus Lutfi

Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini turut prihatin atas kasus perkara Dede Lutfi Alfiandi (LA), demonstran pembawa bendera merah putih dalam aksi pelajar. Dia berharap Lutfi mendapat keadilan dan bisa menghirup udara bebas.

“Untuk itu, atas nama rasa keadilan publik, saya telah memerintahkan anggota Fraksi PKS di Komisi III untuk mengawal kasus ini dengan baik sehingga Lutfi mendapatkan keadilan hukum atas kasus yang menimpanya,” kata Jazuli di Jakarta, Jumat (13/12).

Secara pribadi, dia ingin agar Lutfi dibebaskan dari tuntutan hukum. Sebab, apa yang dilakukan Lutfi adalah bagian dari demonstran yang hanya ingin menyampaikan aspirasinya dengan baik.

“Tapi pada saat yang sama kita hormati proses hukum karena ini sudah masuk ke pengadilan,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini berharap agar proses

pengadilan berjalan cepat. Dia juga meminta majelis hakim memutuskan sesuai rasa keadilan, sehingga Lutfi tidak menanti lama keputusan atas kasusnya dan sesuai harapan.

“Ya, mudah-mudahan Lutfi bisa bebas, berkumpul lagi dengan keluarga, dan melanjutkan kegiatan masa mudanya secara produktif,” kata dia.

Tempo lalu, Lutfi merupakan salah satu demonstran yang mengikuti gelombang demo tolak RKUHP dan RUU kontroversial lain di depan DPR. Kasus ini mendapat perhatian luas,

bahkan muncul gerakan tagar di sosial media yang menyatakan, #savelutfi atau #bebaskanlutfi. (Aza)



Untuk itu, atas nama rasa keadilan publik, saya telah memerintahkan anggota Fraksi PKS di Komisi III untuk mengawal kasus ini dengan baik sehingga Lutfi mendapatkan keadilan hukum atas kasus yang menimpanya

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Saya melihat Dede Lutfi Alfiandi (LA), demonstran pembawa bendera merah putih dalam aksi pelajar demo tolak RKUHP dan RUU kontroversial lain di depan DPR pada September layak untuk mendapatkan kebebasan,

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI



KOMISI III

Liputan Media | belarakyat.com | Jum'at 13 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI @fraksipksdprri @fpkdsdprri fraksi.pks.id



Habib Aboe Berikan Jaminan untuk Lutfi

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi yang bicara hukuman mati bagi koruptor, saat berdialog dengan siswa SMA di Hari Anti Korupsi.

Nasir menyebut pernyataan Jokowi soal hukuman mati hanya retorika, karena seolah ingin melawan koruptor namun Jokowi baru memberi grasi pada koruptor Annas Maamum.

Presiden jangan hanya retorika saja, ya jangan mengatakan terkait hukuman mati tetapi dia harus introspeksi terkait dengan pemberian grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12)

Kita harap Presiden bicara soal korupsi tetap konsisten,"

imbuhn politikus PKS itu.

Legislator asal Aceh itu menjelaskan, sebenarnya hukuman mati napi koruptor sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Di dalam KUHP hasil revisi juga, dijelaskan Nasir, juga akan dibuat hukuman bagi koruptor secara perlahan (gradual). Ketentuan itu diatur Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Jadi, hakim nanti bisa memutuskan misalnya jaksa menuntut untuk hukuman mati, hakim kemudian memutuskan seumur hidup. Nah, nanti ketika dia di lembaga pemasyarakatan menunjukkan perilaku yang baik, kemudian diputuskan lagi menjadi hukuman 20 tahun. Ini sebenarnya hukuman mati bagi koruptor itu sudah ada dalam UU. Tinggal memang jenis kejahatan korupsi apa yang dilakukan," tutur Nasir Djamil. Menurutnya, ada dua kondisi yang memungkinkan untuk dijatuh hukuman mati, yaitu korupsi di suatu daerah yang dalam keadaan krisis ekonomi dan saat terjadi bencana alam.

Atas dasar itu, Nasir mengungkapkan, saat ini Komisi III sedang mengevaluasi apakah



Lutfi bersama Pengacaranya

memberatkan hukuman bagi koruptor masih relevan dengan situasi saat ini atau tidak.

"Jadi, ada dua situasi korupsi bisa dihukum mati, di satu sisi juga ada upaya mengevaluasi apakah hukuman pada kejahatan korupsi itu bisa memberikan dampak jera terkait dengan upaya pencegahan korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi itu disampaikan saat

acara Prestasi Tanpa Korupsi di SMK 57, Senin (9/12).

"Itu yang pertama kehendak masyarakat kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor, itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," ujarnya.

Presiden jangan hanya retorika saja, ya jangan mengatakan terkait hukuman mati tetapi dia harus introspeksi terkait dengan pemberian grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya

**H. M. NASIR
DJAMIL, S.Ag, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi yang bicara hukuman mati bagi koruptor, saat berdialog dengan siswa SMA di Hari Anti Korupsi.

Nasir menyebutkan pernyataan Jokowi soal hukuman mati hanya retorika, karena seolah ingin melawan koruptor namun Jokowi baru memberi grasi pada koruptor Annas Maamun.

Presiden jangan hanya retorika saja, ya jangan mengatakan terkait hukuman mati tetapi dia harus introspeksi terkait dengan pemberian grasi terhadap terpidana korupsi dan lainnya," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

PKS Kritik Jokowi: Retorika Hukuman Mati Koruptor, tapi Beri Grasi

Selasa (10/12)

Kita harap Presiden bicara soal hukuman tetap konsisten," imbuh politikus PKS itu.

Legislator asal Aceh itu menjelaskan, sebenarnya hukuman mati napi koruptor sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Di dalam KUHP hasil revisi juga, dijelaskan Nasir, juga akan dibuat hukuman bagi koruptor secara perlahan (gradual). Ketentuan itu diatur Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Jadi, hakim nanti bisa memutuskan misalnya jaksa menuntut untuk hukuman mati, hakim kemudian memutuskan seumur hidup. Nah, nanti ketika dia di lembaga pemasyarakatan menunjukkan perilaku yang baik, kemudian diputuskan lagi menjadi hukuman 20 tahun. Ini sebenarnya hukuman mati bagi koruptor itu sudah ada dalam UU. Tinggal memang jenis kejahatan korupsi apa yang dilakukan," tutur Nasir Djamil. Menurutnya, ada dua kondisi yang memungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati, yaitu korupsi di suatu daerah yang dalam keadaan krisis ekonomi dan saat terjadi bencana alam.

Atas dasar itu, Nasir

Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pembedaan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

mengungkapkan, saat ini Komisi III sedang mengevaluasi apakah memberatkan hukuman bagi koruptor masih relevan dengan situasi saat ini atau tidak.

"Jadi, ada dua situasi korupsi bisa dihukum mati, di satu sisi juga ada upaya mengevaluasi apakah hukuman pada kejahatan korupsi itu bisa

memberikan dampak jera terkait dengan upaya pencegahan korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi itu disampaikan saat

acara Prestasi Tanpa Korupsi di SMK 57, Senin (9/12).

"Itu yang pertama kehendak masyarakat kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor, itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," ujarnya.



Opsi Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster, KKP Jangan Tergesa-Gesa

Saya mengingatkan kepada pemerintah, bila sekali dibuka kran ekspor benur lobster, godaan pembukaan eksplorasi perburuan benih lobster akan meningkat tajam. Ini sangat mengkhawatirkan kerusakan terumbu karang dan berbagai kerusakan dampak lingkungan lainnya

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP. MM.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (13/12) — Anggota DPR Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin menilai bahwa benih lobster yang akan dibuka kran ekspornya hanya karena motif keuntungan jangka pendek saja. Alasan Menteri KKP terlalu sederhana dengan pertimbangan harga benih lobster di vietnam sebesar Rp 139.000 per benih. Kebijakan ini mesti ada kajian lebih dalam sebelum diresmikan dengan berbagai analisa dampak jangka panjang.

Politisi PKS ini mengusulkan, solusi esensial yang belum kita lakukan adalah meningkatkan kemampuan

pembudidaya lobster dalam skala industri.

"Lobster yang hidup di alam dari seribu ekor benih, hanya seratus ekor yang membesar. Seharusnya bila dibudidayakan dengan cermat, akan mampu membesar hingga 700 ekor dari per 1000 ekor benih yang di tanam", ungkap Akmal.

Persoalan lain, lanjut Akmal, hingga saat ini, negara kita belum mampu menyelesaikan persoalan benih lobster yang di selundupkan. Misal Vietnam, membeli benih dari Singapura. Ternyata benih

lobster itu dari Indonesia. Dan saat ini, ekspor benih lobster masih terlarang. Ini artinya marak sekali penyelundup benih Lobster yang merugikan negara kita.

"Yang terakhir yang saat ini masih belum terpecahkan oleh negara kita terkait lobster adalah pengembangan teknologi hatchery lobster sehingga mengurangi ketergantungan benih dari alam. Benih Lobster saat ini masih sangat tergantung dari benih alam", urainya.

Saat bersamaan, Akmal menambahkan, kita masih kewalahan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Ketika Lingkungan laut terganggu, maka produksi benih lobster di alam akan menurun drastis.

"Sebaiknya Menteri KKP jangan tergesa-gesa hanya tergoda keuntungan besar dari penjualan bibit lobster yang dijual ke luar negeri. Esensi mendasarnya adalah persoalan tata niaga terlebih dahulu, mengapa dari dulu hingga sekarang terlalu panjang

rantainya, sehingga kita seolah terkaget-kaget, harga di end user besar sekali berubah kali lipat dibanding sumber asalnya", ucap Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini meminta, pemerintah tidak boleh serampangan membuat keputusan membuka kembali kran impor benih lobster. Solusi bagi para nelayan dengan mencoba alih profesi penangkap lobster menjadi penangkap ikan merupakan terobosan yang baik. Namun saat ini, baik pemerintah maupun nelayan sama-sama tergoda pada persoalan keuntungan menangkap lobster yang jauh lebih besar dan instan.

"Saya mengingatkan kepada pemerintah, bila sekali dibuka kran ekspor benur lobster, godaan pembukaan eksplorasi perburuan benih lobster akan meningkat tajam. Ini sangat mengkhawatirkan kerusakan terumbu karang dan berbagai kerusakan dampak lingkungan lainnya", ucap Akmal.

la menambahkan, bahwa solusi terkait lobster ini sedi kit

kompleks ketika dihadapkan pada persoalan antara penjagaan populasi lobster yang mendaki langka sehingga akan bergesekan dengan isu lingkungan, juga realita akan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan yang masih sangat ditopang oleh komoditas ini, sehingga menyebabkan eksploitasi terhadap komoditas lobster.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id. Foto : dpr.go.id



Tuntaskan Kajian B100 untuk Atasi Penolakan Uni Eropa terhadap Sawit Indonesia

Jakarta (13/12) — Anggota Komisi 4 DPR Hermanto

mendesak Pemerintah agar lebih serius dalam meneliti dan mengembangkan biodiesel B100 untuk mengantisipasi penolakan masyarakat Uni Eropa terhadap minyak sawit atau CPO (crude palm oil) Indonesia.

Hermanto mengatakan Uni Eropa akan menyepot total impor minyak sawit dari Indonesia tahun 2030 yang diawali dengan

pengurangan penggunaan

penggunaan

penggunaan

an sejak tahun 2024.

"Pemerintah harus berani mematok target B100 bisa diimplementasikan secara efektif di seluruh sektor di dalam negeri paling lambat tahun 2030. Dengan demikian, CPO yang semula dialokasikan untuk ekspor ke Uni Eropa bisa dialihkan penggunaannya di dalam negeri", papar Hermanto kepada wartawan.

Menurut Hermanto Pemerintah Indonesia sudah, sedang dan terus mengupayakan penguatan pasar domestik untuk komoditas sawit melalui program biodiesel. Upaya tersebut saat ini, tepatnya mulai September 2018, sudah mencapai B20. B20 adalah istilah yang mengacu pada campuran bahan bakar dengan kandungan 20 persen minyak nabati dan 80 persen minyak bumi. Angka 20 pada "B20" menunjukkan jumlah minyak nabati yang terkandung dalam campuran biodiesel tersebut. Mulai Januari 2020, rencananya akan dinaikan ke B30.

"Meskipun saat ini baru melaksanakan program B20, kajian-kajian terhadap

Pemerintah harus berani mematok target B100 bisa diimplementasikan secara efektif di seluruh sektor di dalam negeri paling lambat tahun 2030. Dengan demikian, CPO yang semula dialokasikan untuk ekspor ke Uni Eropa bisa dialihkan penggunaannya di dalam negeri

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

penggunaan B100 sudah mulai dilakukan", ungkap legislator dari PKS ini.

Menurutnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian telah melakukan uji pada mobil Hilux Turbo 2.400 cc double cabin dalam perjalanan sejauh 6.173 km.

"Hasilnya, menggunakan bahan bakar B100 lebih irit dibandingkan solar murni. Dengan biodiesel B100, rata-rata bisa menempuh jarak 13,1 km/liter. Adapun dengan solar, rata-rata hanya menempuh jarak 9,6 km/liter," paparnya.

Biodiesel B100 itu, lanjutnya, bahan bakar dari

minyak sawit murni. Samasekali tidak dicampur solar. "Terbukti bisa menggerakkan mobil," ucapnya.

Selanjutnya kata Hermanto, tinggal dilakukan uji-uji lain dan berbagai penyempurnaan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau hal tersebut dilakukan dengan serius, mestinya berbagai kekurangan bisa ditemukan solusinya.

"Kalau dikerjakan dengan serius, target penggunaan B100 di berbagai sektor mestinya bisa terlaksana di tahun 2030", pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

PKS: Cegah Pelambatan Ekonomi dengan Percepat Hilirisasi Industri Berbasis SDA

“Ada empat sektor industri berbasis SDA industri agro, industri maritim, industri kreatif dan digital serta industri pariwisata yang bisa menjadi prioritas. Dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia jika industrinya kuat maka kita bisa bersaing di tingkat global

AMIN, Ak.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (9/12) — Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak meminta Menteri Perindustrian untuk lebih serius terhadap hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dengan memaksimalkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sehingga bisa mendorong kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan hilirisasi ini dinilai juga akan memperkuat daya saing dan struktur industri nasional, memperbesar penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan devisa negara.

Wakil rakyat dari Fraksi PKS Dapil Jatim IV (Kabupaten

Jember dan Lumajang) itu meyakini, hilirisasi industri berbasis SDA bakal mampu meminimalisir laju pelambatan ekonomi nasional. Jika pelambatan itu terus berlangsung, maka dikhawatirkan Indonesia akan terkena imbas resesi yang bakal melanda dunia.

Bank Indonesia mencatat, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) Indonesia selama periode Januari-Oktober 2019 tercatat mengalami defisit hingga US\$ 1,79 miliar atau lebih dari Rp25 triliun. Selama periode tersebut, total ekspor mencapai US\$ 139,1 miliar sementara impor masih lebih tinggi yakni US\$ 140,89 miliar. Sehingga terjadi

selisih sebesar US\$ 1,78 miliar.

Sementara itu, defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III 2019, BI mencatat sebesar US\$ 7,7 miliar atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai US\$ 8,2 miliar (2,9% dari PDB).

“Ada empat sektor industri berbasis SDA industri agro, industri maritim, industri kreatif dan digital serta industri pariwisata yang bisa menjadi prioritas. Dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia jika industrinya kuat maka kita bisa bersaing di tingkat global,” ujar Amin Ak.

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian nasional akan jauh meningkat jika hilirisasi industri agro dan maritim betul-betul digarap serius. Sehingga ekspor dari ketiga sektor tersebut didominasi oleh ekspor pengolahan seperti hilirisasi industri pengolahan kakao, karet, dan sawit, mapun pengolahan pangan.

“Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa, pasar dalam negeri pun sangat besar.

Hilirisasi pada industri berbasis komoditas juga menjadi substitusi impor seperti coklat, susu ataupun pangan lainnya,” tegas Amin.

Demikian juga dengan industri makanan dan minuman di dalam negeri. Meskipun daya beli menurun, industri minuman masih bisa tumbuh 22% dan berhasil menyerap penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 20 triliun dan PMA sejumlah US\$687,91 juta.

Industri makanan dan minuman (mamin) terus menunjukkan daya saing dengan capaian ekspor yang menyentuh angka US\$20 miliar hingga September 2019.

Amin juga meminta Kemenperin betul-betul merealisasikan hilirisasi industri pertambangan mineral dan batubara melalui industri pengolahan dan pemurnian atau

smelter. Smelter merupakan industri padat energi dan padat modal, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

“Penguatan inovasi dan teknologi serta hilirisasi industri berbasis SDA yang merupakan keunggulan komparatif Indonesia adalah kunci kebangkitan ekonomi nasional,” pungkasnya.



Jangan terlalu di umbar impor tekstil masuk ke Indonesia. Jangka panjangnya, Industri tekstil perlu upaya peningkatan daya saing dan skala kapasitas produksi yang membesar

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (12/12) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina memintah Pemerintah untuk lebih memperhatikan Industri tekstil nasional yang mulai goncang akibat berbagai faktor luar dan internal.

Menurut Nevi faktor luar dipengaruhi oleh gempuran produk impor yang mengguncang pasar dalam negeri, sedangkan faktor dari dalam akibat kemampuan daya saing produk dan kemampuan menembus pasar internasional masih kecil.

"Industri tekstil negeri ini sedang kritis. Banyak pabrik tutup atau henggang dari negara kita. Di sentra-sentra perdagangan tekstil seperti Tanah Abang sulit menemukan merk lokal. Sedangkan gempuran produk tekstil impor semakin menjadi dengan kebijakan proteksi minim sehingga kebebasan impor tekstil tanpa barrier", ujar Nevi.

Legislator PKS ini mengatakan, bagi negara-negara dunia, potensi pasar di negara kita sangat menggurikan. ketika

KOMISI VI

Fraksi.pks.id | Kamis 12 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id

Industri Tekstil Mulai Goncang, Perhatian Pemerintah Penting

Negara kita tidak mampu mengantisipasi serangan produk luar akibat pasar bebas, maka yang terjadi adalah defisit neraca dagang. Tercatat Indonesia mengalami defisit sebesar USD160 juta pada tahun 2019. Begitu juga terjadi pada kinerja industri Tekstil dan produk tekstil sepanjang tahun 2018 mengalami defisit neraca perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 tercatat ekspor TPT tumbuh sebesar 0,9%, sedangkan impor melesat jauh sebesar 13,9%. Dengan begitu pertumbuhan nilai neraca perdagangan TPT melambat 25,6% atau terendah sejak 2008. Bila kita terus terlena, maka negara kita akan semakin menderita kemerosotan ekonomi.

Nevi menambahkan, bahwa pemerintah perlu mendengar pesan dari para pelaku industri tekstil yang mengeluhkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Penerbitan peraturan ini mengakibatkan memperbolehkan pedagang pemegang Angka Pengenal Impor Umum (API-U) melakukan importasi kain, benang, dan serat. Kebijakan ini ternyata

tidak mampu memberikan solusi terhadap pelemahan pertumbuhan industri tekstil yang terus menurun sejak 10 tahun terakhir. Peningkatan daya saing industri tekstil, termasuk garmen dari hulu ke hilir sangat mendesak untuk dilakukan.

Sebelumnya, berbagai laporan yang merekap situasi industri tekstil menyebutkan bahwa serbuan impor membuat masyarakat lebih banyak menggunakan barang impor. Berdasarkan data BPS, sepanjang kuartal I tahun 2019 produksi industri tekstil dan pakaian mengalami lonjakan yang signifikan yaitu tumbuh 18,98%, sedangkan pada kuartal I tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 7,46%. Pencapaian ini bahkan melebihi pencapaian sepanjang 2018, dimana hanya tumbuh sebesar 8,73%. Politisi PKS ini setuju dengan usulan pada BKPM bersama pemerintah untuk mendorong perbankan melakukan penetrasi terhadap UMKM yang mendukung industri tekstil. Kemudian dari pemerintah sendiri perlu adanya harmonisasi regulasi untuk turut mendukung berkembangnya tekstil Tanah Air.

Legislator Sumatera Barat



ini mengatakan, di balik lonjakan signifikan pertumbuhan produksi tekstil yang beredar di negara kita, pertumbuhan konsumsi tekstil sepanjang semester I 2019 terus meningkat namun peningkatan ini tidak dinikmati pelaku industri lokal. Situasi tersebut menjadi jawaban melemahnya industri tekstil lokal akibat gempuran produk impor. Contoh yang dikeluhkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakni sulitnya untuk menemukan produk tekstil dalam negeri di Pasar Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan tekstil di Ibu Kota. Ini

membuktikan bahwa ada sesuatu yang agak mengkhawatirkan dan perlu segera ada perbaikan. Perbaikan ini adalah berupa revitalisasi mesin sebesar Rp175 triliun yang mencakup sektor hulu dan hilir seperti peremajaan mesin, peningkatan kapasitas produksi hingga memacu ekspor.

"Semoga ada solusi cepat dari pemerintah untuk memberikan solusi polemik guncangnya industri tekstil nasional. Solusi jangka pendek saat ini adalah proteksi barang impor.

Selengkapnya Kunjungi Fraksi.pks.id





PKS Desak Pemerintah Percepat Pengembangan Kawasan Industri Halal

“Indonesia ini merupakan potensi pasar terbesar Industri Halal di dunia, jangan sampai kita bangsa Indonesia hanya sebagai objek atau konsumen saja, tapi kita harus jadi subjek atau produsen produk halal

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (10/12) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Chairul Anwar mengungkapkan perlunya pemerintah untuk melakukan percepatan pengembangan Kawasan Industri Halal di Indonesia. Hal ini diungkapkan Chairul disela Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Senin,09/12) di Gedung DPR RI.

“Kami mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pengembangan Kawasan Industri Halal, akhir November lalu, Anggota Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Industri Modern Cikande Provinsi

Banten, dimana didalamnya terdapat sekitar 500 hektar sebagai Kawasan Industri Halal atau Modern Halal Valley. Dalam rencana pembangunan kawasan industri halal yang diungkapkan Kementerian Perindustrian ada sekitar 4 kawasan yang direncanakan akan dibangun, tapi sampai saat ini baru satu kawasan yang berjalan,” ungkap Chairul.

Ada beberapa alasan mengapa Kementerian Perindustrian didesak untuk mempercepat pengembangan Kawasan Industri Halal di Indonesia, diantaranya adalah Indonesia merupakan pasar terbesar Industri Halal, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

“Indonesia ini merupakan potensi pasar terbesar Industri Halal di dunia, jangan sampai kita bangsa Indonesia hanya sebagai objek atau konsumen saja, tapi kita harus jadi subjek atau produsen produk halal.

Jika ditinjau dari segi sumberdaya, Indonesia mempunyai sumberdaya yang cukup besar baik sumber daya manusia dan sumberdaya alam terkait Industri halal ini.

Alasan penting lainnya adalah beriakunya amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa pemberlakuan sertifikasi produk halal akan wajib dilaksanakan pada 17 Oktober 2019 yang lalu, oleh karena itu pemerintah harus mempercepat pengembangan kawasan Industri Halal di Indonesia,” ungkap Politisi PKS asal Riau.

Chairul menjelaskan, jika dilihat dari potensi yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya tidak terlalu susah untuk mendatangkan investor untuk mengembangkan Kawasan Industri Halal. Oleh karena itu pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung pengembangan Kawasan Industri Halal.

“Ada beberapa hal yang harus disiapkan pemerintah dalam mempercepat pengembangan kawasan Industri Halal diantaranya payung hukum yang pasti, pemerintah harus segera membuat peraturan tentang Kawasan Industri Halal yang bisa dalam bentuk Peraturan Menteri Perindustrian, dimana dalam peraturan itu dicantumkan berbagai macam ketentuan dalam pengembangan Kawasan Industri Halal, misalnya mengenai pelayanan perijinan dan sertifikasi satu atap yang tidak ribet, kemudahan Investasi dengan menawarkan berbagai fasilitas misalnya pengurangan pajak. Disamping itu Kawasan Industri Halal

al ini juga harus bekerjasama dengan usaha dan menengah (UKM), karena cukup banyak pelaku Industri Halal berasal dari UKM,” jelas Anggota DPR RI dari dapil Riau 1 ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Agar Tidak Terus Impor Minyak, PKS: Jokowi Harus Berani Buat Terobosan

Pemerintah harus segera memulai program peningkatan eksplorasi, lifting dan produksi minyak secara sistematis agar kebutuhan minyak dalam negeri dapat tercukupi tanpa harus impor.

**Dr. H. MULYANTO,
M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (13/12) — Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani membuat terobosan agar defisit neraca minyak Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap.

Untuk mencapai itu, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera di Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Mulyanto dalam keterangan tertulisnya Jum'at (13/12), perlu upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk meminimalkan rasio defisit minyak.

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, PT Pertamina (Persero) menargetkan kenaikan produksi minyak&gas bumi (migas) 923 ribu barel setara minyak (Barel Oil Equivalent Per Day /BOEPD) 2020. Target ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, 906.000 BOEPD.

Diungkapkan Mulyanto, target produksi yang ditetapkan Pemerintah masih jauh dari kondisi ideal. Berdasarkan data British Petroleum (BP) jumlah

produksi minyak Indonesia saat ini 1,18 juta barel/hari. Jumlah konsumsi 1,21 juta barel/hari. Artinya, terjadi defisit neraca minyak 54 ribu barel/hari.

Jadi, lanjut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, target tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa.

"Masalahnya, selalu saja realisasi dari target produksi itu yang tidak tercapai. Sementara Targetnya sendiri terus turun dan juga tidak terealisasi," kata Mulyanto.

Dikatakan laki-laki pemegang gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai) tersebut, Pemerintah harus segera memulai program peningkatan eksplorasi, lifting dan produksi minyak secara sistematis agar kebutuhan minyak dalam negeri dapat tercukupi tanpa harus impor.





Dorong Pengelolaan Lebih Baik, PKS Harap PLN Tidak Naikan Tarif Listrik

Dari beberapa negara yang ada, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di dunia. Yang menjadi catatan saat ini, beberapa negara memiliki harga tarif listrik yang lebih murah apabila disandingkan dengan Indonesia

SAADIAH ULUPUTTY, ST.

Anggota Komisi VII DPR RI



image : jawapos

Jakarta (10/12) -- Anggota komisi VII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Ulluputy mengatakan pihaknya sangat fokus memperjuangkan agar energi, khususnya kelistrikan di Indonesia bisa dikelola dengan baik.

"Kami selalu berupaya memperjuangkan agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya terkait dengan listrik benar-benar bisa dirasakan dengan baik disertai pengelolaan yang maksimal," ungkap Saadiah.

Saadiah mengatakan saat ini kondisi rasio elektrifikasi kelistrikan saat ini mengalami kenaikan secara signifikan.

"Rasio elektrifikasi kelistrikan di Indonesia saat ini mengalami capaian yang meningkat. Namun yang menjadi catatan rasio elektrifikasi di daerah 3 T yang hanya menyala 6 jam saja dalam sehari", ungkapnya.

Dari beberapa negara yang ada, lanjut

Saadiah, tarif listrik di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan sejumlah negara yang ada di dunia.

"Yang menjadi catatan saat ini, beberapa negara memiliki harga tarif listrik yang lebih murah apabila disandingkan dengan Indonesia", tambahnya.

Pada Januari 2020, menurut Saadiah tarif adjusment diperkirakan akan mengalami penyesuaian, apakah naik ataukah turun tergantung beberapa harga komoditas di dunia.

"Salah satu yang bisa membuat tarif adjusment

naik antara lain karena harga batu bara dunia, laju inflasi dan ICP yang cenderung naik", tutup Saadiah.



Saadiah Ulluputy, S.T.



PKS Tegaskan Pentingnya Bekal Ilmu Agama dalam Mengatasi Masalah Bangsa

Saya mempertanyakan mata pelajaran Agama di Sekolah yang hanya 2 Jam, sementara sangat komplek yaitu meliputi Ibadah, Akhlaq atau Tauhid sehingga perlu ditambah jamnya agar sesuai dengan tahapan & harapan kita semua

**Hj. NUR AZIZAH
TAMHID, B.A.,MA**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (12/12) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI Dengan Sekjen Kemenag RI dan Para Kepala Kanwil Kemenag Wilayah Indonesia Barat & Timur Kamis, (12/12)

tentang Kinerja Fungsi Agama & Pendidikan Keagamaan di Wilayah Kanwil Kemenag serta isu-isu Aktual mendapat perhatian anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid.

Nur Azizah mengingatkan & menekankan pada semua bahwa Komisi VIII berorientasi pada Kemaslahatan Dunia Akhirat, dengan mengutip QS. At-Taubah : 71

"Saya mempertanyakan mata pelajaran Agama di Sekolah yang hanya 2 Jam, sementara sangat komplek yaitu meliputi Ibadah, Akhlaq atau Tauhid sehingga perlu ditambah jamnya agar sesuai dengan tahapan & harapan kita semua", ungkapnya.

Nur Azizah menambahkan bahwa bekal ilmu Agama di SD & SMP, diharapkan dasar agama kuat. Saat anak Baligh dimasa SMP diharapkan sudah bisa memenuhi kewajibannya sebagai muslim & muslimah.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Azizah juga menyinggung Maraknya HIV Aids, Perceraian, LGBT, Perzinaan, Pembunuhan,

Pornografi, Mabuk, Mencuri, Merokok, Tawuran Dll agar menjadi Perhatian Serius bagi Para Penyuluh Agama.

"Penyakit masyarakat tersebut bisa dihilangkan dengan cara meningkatkan Kualitas serta Quantitas dalam menjalankan ajaran agama", pungkasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut juga mengingatkan juga terkait Ramadhan satu dengan Ramadhan lainnya sebagai penghapus dosa2 kecil.

"tidak berlakunya pelaku Zina, Mabuk dihukum cambuk yang merupakan dosa besar, otomatis dosa2 besar itu masih ada padahal sebelum ada hukuman tersebut maka palaku zina masih belum tarampuni dosa2 besarnya. sementara kasian anak2 tersebut jika tidak ada hukuman dunia ini karena akan terus bertumpuk dosa2nya", paparnya.

Tak hanya itu, Nur Azizah juga mempertanyakan Visi Misi Kakanwil agar bisa menjadi acuan seperti anggaran jika memang kurang agar bisa diperjuangkan.





Kontroversi Menghapus Khilafah dan Jihad dalam Kurikulum Kemenag



Jakarta (10/12) — Keluarnya keputusan menteri agama nomor 183 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Belajar secara menyeluruh tentang agama yang dipeluknya, termasuk pemerintahan agama dalam hal ini pemerintahan islam dan jihad merupakan salah satu implementasi penduduk dalam beragama.

Anggota komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menghimbau Kementerian Agama, agar tetap memasukkan materi jihad dan khilafah dalam pelajaran agama di sekolah dan madrasah-madrasah.

“Pemerintah harus memahami terminologi agama secara lengkap, dan jangan sampai paranoid terhadap realita sejarah, khususnya sejarah Islam, karena hal itu merupakan Fakta sejarah, bahwa adanya masa khalafaurrasyidin, Khilafah umayyah, Khilafah Abbasiyah dan sampai Khilafah Turki Ustmani”, tutur Iskan.

Menurut Iskan, Murid-murid memang harus tahu tentang fakta sejarah tersebut, dan diharapkan dengan mereka mempelajari fakta sejarah tersebut, akan terbangun nilai-nilai positif tentang berbangsa dan bernegara.

Meski demikian, Iskan menghimbau para guru dalam pengajarannya bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar yang dianut di negara kita, yaitu Negara yang berideologi Pancasila.

“Dulu, Indonesia berjuang melawan para penjajah, dan ulama-ulama kita menyerukan untuk berjihad membela dan memperjuangkan Negara ini. Kalimat Jihad juga merupakan nilai yang ada di dalam Alqur’an, mengajarkan tentang semangat berjuang, mempertahankan negara, agama dan kehormatan suatu bangsa.” Ujar Iskan

Iskan Juga menambahkan Kemenag harusnya memerlukan makna jihad dalam terminologi agama, tapi menafikan makna perang adalah pembodohan intelektual.

“konsensus kita dalam bernegara yang 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD-1945, Negara

Pemerintah harus memahami terminologi agama secara lengkap, dan jangan sampai paranoid terhadap realita sejarah, khususnya sejarah Islam, karena hal itu merupakan Fakta sejarah, bahwa adanya masa khalafaurrasyidin, Khilafah umayyah, Khilafah Abbasiyah dan sampai Khilafah Turki Ustmani

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA

Anggota Komisi VIII DPR RI

kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka tunggal Ika harus kita jaga bersama”. Tutup Iskan.

Foto : dpr.go.id

Apresiasi Repatriasi 977 WNI, Mufida Minta Pekerja Migran Diberdayakan

Pemerintah jangan hanya berhenti pada langkah pemulangan saja. Tapi harus diperhatikan dan dilakukan pendampingan pasca pemulangan sehingga para Repatriasi WNI bisa membangun masa depannya yang lebih baik di daerah asal.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (09/12) — Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengapresiasi pemulangan kembali (repatriasi) 977 WNI dari Malaysia. Diharapkan, langkah ini dilanjutkan dengan upaya pemberdayaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut di daerah asal masing-masing.

Demikian ditegaskan Mufida menyikapi program repatriasi sebagai hasil kerja sama KBRI Kuala Lumpur dengan Jabatan Imigrasi Malaysia, KJRI Johor Baru, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sosial RI, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sebagaimana diberitakan,

para WNI yang sebagiannya merupakan kelompok rentan (perempuan dan anak-anak) tersebut, dipulangkan dari tahanan-tahanan imigrasi di seluruh wilayah Semenanjung Malaysia. Sejak April 2019 sebanyak 977 WNI yang terdiri atas 910 orang dewasa dan 67 bayi serta anak-anak telah dipulangkan ke Indonesia.

“Setelah pemerintah memulangkan ratusan WNI, saat ini yang terpenting adalah bagaimana solusi recovery dan revitalisasi kehidupan mereka di daerah asal,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini dalam siaran persnya, Senin (9/12/2019).

Menurut Mufida, upaya recovery dan revitalisasi

tersebut melalui pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, recovery mentalitas dan mindset, agar ada semangat hidup lebih positif bagi Repatriasi WNI di daerah asalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan mental spiritual, tersedianya konselor bahkan lembaga konseling, di daerah asal agar trauma yang sdang dialami dengan cepat ditangani.

Kedua, perlu dilakukan upaya konkrit dan signifikan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, diantaranya dengan memberikan pelatihan wirausaha rumah tangga, kerjasama permodalan Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan institusi perbankan, kerjasama kepemilikan rumah tinggal atau kendaraan bermotor dengan institusi keuangan.

Ketiga, memberi perhatian pada prestasi dan taraf pendidikan anak pekerja migran dengan bimbingan belajar gratis, beasiswa berprestasi, dan juga kreativitas program.

“yang keempat adalah membentuk Forum Informasi dan Komunikasi sebagai wadah komunikasi bersama antara

mereka, agar saling mengetahui apa yang akan dilakukan serta keberhasilan apa yang bisa ditiru,” ujar Mufida.

Mufida menambahkan, upaya-upaya recovery dan pemberdayaan tersebut pada tahap awal bisa difokuskan pada daerah asal pemulangan PMI dari Malaysia sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, bisa dikembangkan kepada daerah-daerah yang menjadi kontributor utama pekerja migran nasional, yaitu Jawa Barat (Cirebon, Indramayu, Subang, Cianjur dan Sukabumi), Jawa Timur (Ponorogo, Malang) dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur)

Pemerintah jangan hanya berhenti pada langkah

pemulangan saja. Tapi harus diperhatikan dan dilakukan pendampingan pasca pemulangan sehingga para Repatriasi WNI bisa membangun masa depannya yang lebih baik di daerah asal



RDP Komisi IX dengan Kemenkes dan Mitra Komisi Lainnya



Mau teknisnya seperti apa, prosesnya seperti apa, butuh berapa hari berkomunikasi dengan Menkeu, itu bukan urusan Komisi IX. Yang kita mau tahu adalah, per 1 Januari 2020 kelas III Mandiri tidak ada kenaikan. Terima kasih

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

*Anggota DPR RI Komisi IX
dari Fraksi PKS*



Teman-teman pekerja meminta rapat kerja antara Komisi IX dan Komisi VI agar segera diagendakan untuk membahas rekomendasi yang sempat dibuat

KOMISI IX

Fraksi.pks.id | Senin 09 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Dikunjungi Serikat Pekerja BUMN, DPR Dorong Rapat Kerja Gabungan

H. ALIFUDIN, SE, MM
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (9/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Alifudin mendapat kunjungan dari Serikat Buruh (Perkasa) di kantor Fraksi PKS, Jumat, (6/12/2019).

Menurut Alifudin kunjungan Serikat Perkasa merupakan kehormatan baginya dan pihaknya akan membantu memperjuangkan hak-hak anggota.

"Meski begitu lama namun serikat buruh membawa sejumlah dokumen yang insyaAllah akan kami perjuangkan", ungkap Alifudin.

Seperti diketahui bahwa pada tahun 2013, komisi IX DPR RI membentuk satuan tugas untuk kaum buruh BUMN yang diken

al dengan nama Panja OS BUMN.

Pembentukan Panja diadiri 2 orang Menteri BUMN saat itu yakni Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, serta diadiri sejumlah Direksi BUMN. Namun hingga saat ini hasil rekomendasi Panja blm juga ada yg dijalankan oleh pihak BUMN.

"Kondisi berlarut-larut ini, akan terus diupayakan, agar rekomendasi bisa dijalankan oleh pihak Kementerian", harap Alifudin.

Seiring berjalannya waktu, justru banyak pekerja yang di PHK oleh vendor yang mempekerjakan tenaga ahli daya itu.

Geber BUMN yg terdiri dari 4 Aliansi dan beberapa serikat pekerja terus meminta komisi IX DPR RI, agar dapat dilaksanakan Rapat Gabungan antara komisi IX dan komisi VI, karena pekerjaan para buruh ada di dalam perusahaan BUMN yang di awasi oleh komisi VI.

"Ya.. teman-teman pekerja meminta rapat kerja antara



Komisi IX dan Komisi VI agar segera diagendakan untuk membahas rekomendasi yang sempat dibuat", tutur Alifudin.

Adanya pertemuan Anggota komisi IX DPR RI Dapil Kalimantan Barat dari Fraksi

PKS Alifudin dengan Geber BUMN diharapkan bisa menimbulkan semangat baru untuk menyatukan suara agar Raker gabungan dapat terlaksana.

Izin Edar Makanan dan Obat Harus Tetap di BPOM, Jangan dipindahkan ke Kemenkes

"Bagaimana kita bicara soal SDM unggul seperti yang diminta Presiden, jika suplay makanan dan obat tidak terjamin keamanannya dan kebaikannya. Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (14/12) — Izin edar makanan dan obat harus tetap ditangani BPOM. Sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan peredaran makanan dan obat di masyarakat, BPOM harus mendapatkan dukungan penguatan kelembagaan dari DPR.

"Kemenkes urus BPJS saja belum beres, bagaimana mau urus izin edar?", tanya Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX

DPR RI dalam program KIE bersama tokoh Masyarakat di Gedung PGRI, Sumber, Cirebon (14/12).

Hadir juga sebagai narasumber Yudianto yang merupakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, Badan POM. Serta Edah Zubaedah, Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Bandung.

Dalam kegiatan sosialisasi yang bertema, BPOM Hadir Wujudkan Obat dan Makanan Aman, Netty memaparkan tentang pentingnya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang makanan dan obat yang aman.

"Saat ini, dalam operasi yang dilakukan BPOM masih banyak ditemukan makanan dan obat ilegal yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Misalnya, tanpa nomor registrasi, tanpa ijin edar, kedaluwarsa, rusak atau mengandung bahan berbahaya," kata Netty.

Menurut data lapangan, dalam operasi Opon VIII Tahun 2019 ditemukan bahan pangan dan obat ilegal, sebagai berikut: senilai 61 Milyar pangan segar dan olahan, 172.532 pieces

kemasan obat, 170.119 kemasan pangan dan obat kadaluarsa/rusak, 1, 6 juta bungkus jamu dari 330 merk, serta 2217 situs layanan penjualan obat dan makanan online yang tidak sesuai dengan aturan BPOM.

Padaahal, kata Netty, masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan keamanan dari negara terhadap hal-hal seperti itu.

"Bagaimana kita bicara soal SDM unggul seperti yang diminta Presiden, jika suplay makanan dan obat tidak terjamin keamanan dan kebaikannya. Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah", ungkap Netty.

Oleh karena itu, dalam kegiatan KIE bersama BPOM, Netty mengharapkan masyarakat membangun kesadaran terhadap makanan dan obat yang dikonsumsi sehari-hari.

"Negara mengatur dan mengawasi peredaran makanan dan obat, masyarakat sadar untuk memilih yang sehat. Pastikan Cek KLIK, Kemasan, Label, Izin edar dan masa Kedaluwarsanya sebelum membeli dan mengonsumsi pangan dan obat", pungkasnya.





Jelang PON 2020, DPR Dorong Berbagai Persoalan Dunia Olahraga Diselesaikan

Salah satu faktor utama penghapusan tenis meja dalam PON 2020 adalah karena karut marut dalam PTMSI. Ia berharap keruwetan tersebut dapat selesai, "PSSI saja bisa, kenapa PTMSI tidak ?

**Dr. H. ABDUL
FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (14/12) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar berbagai persoalan dunia olahraga di Indonesia diselesaikan. Salah satunya adalah soal tugalisme dalam kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

Menurut Fikri buntut dari masalah tersebut adalah absennya atlet Indonesia dalam ajang SEA Games di Filipina yang baru saja berakhir.

"Padahal tenis meja ini banyak nomor pertandingannya dan kita berpotensi untuk dapat medali," ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Makassar (13/12).

Dalam beberapa tahun terakhir, kepengurusan PTMSI terpecah jadi tiga. Terdapat tiga kubu yang mengklaim sebagai kepengurusan PTMSI yang sah periode 2018-2022, yakni kubu Oegroseno, Lukman Eddy dan Peter Layardilay. Kisruh tersebut juga berimbas bagi kepengurusan di tingkat bawahnya karena beberapa daerah juga memiliki tiga kepengurusan.

Pada PON 2020 mendatang, tenis meja merupakan salah satu dari 10 cabang olah raga yang akan dihapus.

Anggota dari Fraksi PKS ini menilai salah satu faktor utama penghapusan tenis meja dalam PON 2020 adalah karena karut marut dalam PTMSI. Ia berharap keruwetan tersebut dapat selesai, "PSSI saja bisa, kenapa PTMSI tidak ?" tanya Fikri.

Anggota dari Dapil Jawa Tengah IX ini sebetulnya menyoal terdapat pengurangan cabang olahraga yang dipertandingkan, dari 47 menjadi 37. Pengurangan

tersebut diantaranya karena ketidak seiapan venue. Menurutnya jika karena ketidak seiapan venue, pertandingan cabor lain tersebut bisa dilakukan di provinsi lain.

"Bisa di Jakarta, Bali atau di provinsi lain. Ini tentu mengecewakan banyak pihak karena beberapa sudah melaksanakan Pra PON, termasuk Sulawesi Selatan. Bagi Pemda, tentu akan menjadi susah mempertanggungjawabkan anggaran karena berbagai persiapan dan kegiatan sudah dilaksanakan," urainya.

Fikri tidak menampik bahwa dinamika seputar penyelenggaraan PON 2020 mendatang mencerminkan kondisi olahraga nasional.

"Persoalan yang sebetulnya bahkan lebih luas; seperti soal pembinaan olahraga yang belum terarah, peran lembaga pengembangan olahraga yang cukup lemah, keterbatasan sarana prasarana olahraga yang terbatas, dan lain-lain. Padahal, Indonesia berminat mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Tentunya hal tersebut perlu ditunjang oleh sarana prasarana dan prestasi olahraga yang baik", tutup Fikri.



Link and Match Dunia Vokasi Perlu Kompetensi dan Koordinasi Sinergis

Jakarta (10/12) — Lulusan yang memiliki link and match dengan dunia kerja menjadi fokus pengembangan pendidikan vokasi dalam tiga tahun terakhir. Dengan menumpukan kegiatan pendidikan 70% di lapangan dan 30% persen di kelas diharapkan mampu menelurkan lulusan pendidikan vokasi yang lebih terampil di dunia kerja.

Sayangnya fakta

menunjukkan bahwa lulusan SMK, salah satu sekolah dengan sistem pendidikan vokasi, justru menyumbang angka pengangguran tertinggi di negeri ini.

"Fakta ini menunjukkan masih ada ketimpangan dalam konsep link and match antara dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Padahal sistem pendidikan vokasi sudah mengakomodir 70% praktik lapangan dan 30% teori. Artinya masih ada yang tidak klop dengan konsep link and match ini, bisa dari soal kerja lapangannya, tenaga kependidikannya maupun dari kurikulumnya," kata anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

Ledia menguraikan, meskipun 70% waktu siswa digiatkan dalam dunia kerja praktik lapangan namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan

yang memperlakukan siswa hanya sebagai helper, bukan sebagai siswa magang yang tengah memenuhi target kerja sesuai kurikulum.

"dari berbagai masukan dan serap aspirasi terungkap kalau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menjadi mitra sekolah kerap hanya menjadikan anak-anak magang sebagai helper, tenaga bantu-bantu di beberapa unit. Kadang bahkan tidak berkesuaian dengan rencana ajar, yang penting magang. Padahal siswa magang seharusnya memiliki rencana, target dan evaluasi pencapaian yang ditentukan dan terukur, serta sebelum magang antara sekolah dengan mitra DUDI sudah ada kesepakatan akan rencana, target dan evaluasi pencapaian praktik lapangan dari siswa tersebut." tegasnya.

Soal kompetensi guru, Ledia juga mengingatkan bahwa Guru yang mengajar pada sekolah vokasi perlu ditingkatkan keahliannya, diantaranya dengan memastikan mereka memperoleh pelatihan yang tepat sampai memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ajar.

Guru yang mengajar pada sekolah vokasi perlu ditingkatkan keahliannya, diantaranya dengan memastikan mereka memperoleh pelatihan yang tepat sampai memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang ajar.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Sebab hampir semua sekolah vokasi memiliki jumlah guru yang cukup untuk mengajar tetapi ternyata banyak diantara para guru ini belum memiliki sertifikat kompetensi yang berkesesuaian.

"padahal logikanya kalau siswa didorong untuk menjadi terampil dan ahli tenaga pengajarnya harus lebih terampil dan ahli dong. Salah satunya ya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki," katanya.

Lebih lanjut alet Fraksi PKS ini meminta implementasi kurikulum sekolah vokasi juga perlu pula diawasi dan dievaluasi secara berkala. Sebab kalau kurikulumnya sudah menitikberatkan pada soal ketrampilan, keahlian, link

and match, maka pencapaian ketrampilan minimal dan kompetensi minimal dari setiap siswa dapat harus dilihat secara terukur.

Sebelum magang, sesudah magang, selama di sekolah, semua pencapaian pemahaman teori dan ketrampilan peserta didik harus terukur sesuai dengan kurikulum yang ada. Apakah akan melibatkan DUDI? "Bisa saja, ini artinya sekolah pun perlu proaktif membangun komunikasi dengan mitra DUDI agar terjadi implementasi kurikulum dengan kebutuhan link and match yang tepat." ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

Turunnya Kemampuan literasi, Sakinah: Indonesia Minim Akses Bacaan dan Minat Baca

Jakarta (09/12) — Skor Indonesia dalam Pogramme for International Student Assessment (PISA) turun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terungkap dalam rilis skor PISA tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Co-Operation Development atau OECD Selasa (3/12/2019).

Kemampuan membaca anak-anak Indonesia usia 15 tahun pada tahun 2018 turun dari 397 menjadi 371. Skor

ampuan matematika turun dari 386 menjadi 379. Sedangkan skor sains juga mengalami penurunan dari 403 pada tahun 2015 menjadi 396 pada tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi X dapil Sulawesi Tengah yang membidangi pendidikan Sakinah Aljufri menyampaikan keprihatinannya atas turunnya skor PISA untuk Indonesia.

Bagi Sakinah turunnnya skor literasi Indonesia dipegaruhi minimnya akses bahan bacaan, dan minat baca yang kurang.

“Kita tidak menafikan bahwa semakin hari kondisi literasi kita semakin menurun. Karena kurangnya akses bacaan untuk daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Kemudian untuk daerah perkotaan akses bacaan banyak tapi minat membaca yang harus ditumbuhkan lagi,” papar Sakinah di kompleks Senayan Jumat, (06/12/2019). Minat baca harus

“Kita semua harus terlibat dalam meningkatkan literasi, kita harus punya kepedulian bersama. Anak-anak adalah aset bangsa yang tidak boleh dibiarkan, mereka wajib mendapatkan pendidikan seperti halnya anak-anak yang lainnya untuk mewujudkan generasi yang cerdas

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Komisi X DPR RI

ditumbuhkan di lingkungannya baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan RT dan lingkungan RW.

“Perpustakaan harus menarik bagi generasi millennial, perpustakaan harus menyediakan konten digital, dan untuk menarik minat membaca perpustakaan harus ada tempat taman bacanya, tempat nongkrongnya.”

Untuk menambah minat baca Sakinah mengatakan “Orang tua terutama ibu sangat berperan dalam menumbuhkan

minat baca seorang anak, setidaknya-tidaknya harus ada perpustakaan kecil di dalam rumah, berikan hadiah buku untuk anak-anak”. imbuhnya.

“Kita semua harus terlibat dalam meningkatkan literasi, kita harus punya kepedulian bersama. Anak-anak adalah aset bangsa yang tidak boleh dibiarkan, mereka wajib mendapatkan pendidikan seperti halnya anak-anak yang lainnya untuk mewujudkan generasi yang cerdas.” Pungkasnya.



kem

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Pemerintah Jangan Lamban

Jakarta (11/12) - Anggota DPR RI Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2019 tercatat 5,02 persen.

Menurut Ecky angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3 persen.

"Tidak hanya year on year, pelambatan perekonomian juga terjadi jika dihitung secara kuartalan. Kuartal III ini melambat 3,06 persen dari kuartal sebelumnya sebesar 3,09 persen," kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/12/2019).

Anggota Legislatif dari Dapil Jabar III ini menuturkan pemerintah kerap menjadikan kondisi perekonomian global yang masih terus diwarnai perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sebagai penyebab terjadinya pelambatan perekonomian nasional.

"Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Pemerintah harusnya jangan

lamban, dapat bertindak cepat dan efektif dalam mencari alternatif mendongkrak pertumbuhan ekonomi", lanjut Ecky.

"Faktanya, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih dari 50 persen disumbang oleh konsumsi rumah tangga, yang artinya fundamental perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor konsumsi masyarakat, bukan pada produksi," paparnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menjelaskan kesalahan pemerintah yang menuduh kecilnya investasi asing di Indonesia menjadi penyebab tumbuhnya ekonomi Indonesia tidak sesuai target, pada kenyataannya investasi asing justru tumbuh 17,8 persen pada kuartal III 2019.

"Simpul masalahnya adalah Pemerintah tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memacu produksi dalam negeri agar semakin meningkat", tuturnya.

Ecky mencatat setidaknya ada tiga sektor yang berperan

penting yang mengalami penurunan, yaitu sektor otomotif, karet dan logam. Pemerintah terlalu fokus dengan permasalahan eksternal dibanding dengan mengoreksi apa yang terjadi di internal dalam negeri.

Menyenggung terkait pelambatan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut tidak lepas dari posisi pendapatan perkapita Indonesia yang saat ini juga menjadi sorotan.

Data Bank Dunia menyebut Indonesia berada pada posisi Lower Middle Income, padahal ditargetkan pemerintah melalui Bappenas pada tahun 2020 akan meningkat menjadi Upper Middle Income.

"target pemerintah tidak rasional, karena sampai akhir 2019 pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 5 persen, bahkan dengan lambannya gerak pemerintah maka diprediksi tahun 2020 pun pertumbuhan tidak akan mencapai 5 persen", tutup Ecky.

Simpul masalahnya adalah Pemerintah tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memacu produksi dalam negeri agar semakin meningkat

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI



Data juga menyebutkan bahwa selama ini utang negara lebih banyak dipergunakan untuk operasional birokrasi. Peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan belanja infrastruktur lebih rendah dari pembayaran utang, belanja barang dan belanja pegawai.

**Dr. Hj.
ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (12/12) — Statemen yang seringkali dilontarkan berbagai pihak tentang utang Indonesia yang dinyatakan aman karena masih di bawah ambang batas 60 persen rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), mendapat kritikan dari anggota DPR RI dari fraksi PKS Anis Byarwati.

Dalam rapat komisi XI dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko pada Rabu, (11/12) Anis mengatakan pihaknya mengukut utang berbahaya atau tidak bagi negara, bukan hanya dari rasionya terhadap PDB.

"Ada indikator-indikator lain yang bisa digunakan untuk

KOMISI XI

Fraaksi.pks.id | Kamis 12 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



Utang Indonesia Sudah Berada Pada Level yang Membahayakan



mengukur apakah utang tersebut sudah pada tahap berbahaya atau tidak." ungkapnya.

Menurut Anis, mengukur utang berbahaya atau tidak untuk negara tidak hanya tergantung pada rasio utang terhadap PDB. Apalagi dengan menggunakan persepsi yang menggeser bahwa rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara lain.

"Jangan terjebak dengan persepsi rasio utang kita paling kecil di dunia," tuturnya mengingatkan.

Sebagai contoh, Anis menyebut Jepang yang memiliki jumlah utang delapan kali lebih besar dari Indonesia, dengan rasio utang terhadap PDB nya sebesar 230 persen.

Yang harus diingat, papar Anis, Jepang bukan merupakan debitor murni karena dia memberikan utang kepada negara-negara lain termasuk kepada Indonesia dalam bentuk surat berharga dan pinjaman langsung. Jepang juga merupakan pemegang surat utang terbesar untuk Amerika, menggeser Tiongkok.

Selain itu, suku bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang sangat rendah. Dalam kurun 10 tahun suku bunga yang diberikan hanya bernilai dikisaran 0 persen yang merupakan terendah di dunia. Ditambah dengan mayoritas surat utangnya dibeli oleh rakyatnya sendiri sehingga dana pembayaran bunga berputar di

negaranya sendiri. Oleh karena itu beban utang Jepang tidak berdampak besar pada stabilitas makro ekonomi negaranya.

Contoh negara lain yang diangkat oleh Anis adalah Amerika Serikat yang memiliki rasio utang 106,1 persen terhadap PDB. Tetapi AS hanya menganggarkan 7 persen anggaran negaranya untuk membayar utang. Mayoritas anggaran negara AS dialokasikan untuk program sosial yang langsung diterima oleh masyarakatnya dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan.

"Kondisi Jepang ini jelas berbeda dengan Indonesia yang merupakan debitor murni. Surat utang Indonesia dalam bentuk rupiah dipegang oleh pihak asing sangat besar sampai 39 persen. Terbesar diantara negara-negara emerging market yang rata-rata 25 persen. Dan ini harus menjadi indikator bahwa utang kita sudah pada level yang membahayakan" tegasnya.

Hal lain yang dikritisi Anis adalah argumentasi bahwa utang dipakai untuk sektor produktif. Menurutnya, jika mayoritas utang dialokasikan

untuk infrastruktur, maka kurang efektif dan tidak sesuai dengan data. Data menunjukkan rasio pembayaran utang terhadap pendapatan ekspor mencapai 24 sampai 28 persen. Salah satu angka tertinggi diantara negara-negara berkembang. Data juga menyebutkan bahwa selama ini utang negara lebih banyak dipergunakan untuk operasional birokrasi. Peningkatan belanja modal yang berkaitan dengan belanja infrastruktur lebih rendah dari pembayaran utang, belanja barang dan belanja pegawai. Postur belanja seperti ini membahayakan keuangan negara.

"Kalau dianggap produktif dimana letak produktifitasnya?" tanyanya lagi.

Masalah lain yang disoroti Anis terkait dengan beban pembayaran utang yang ikut dibebankan kepada BUMN. Padahal jika BUMN merugi maka yang harus menanggung bebannya adalah pemerintah juga, dan seringkali rakyat terkena imbasnya dengan kenaikan tarif dan harga kebutuhan pokok.

"Kebijakan utang ini perlu ditinjau dan dikaji kembali" pungkasnya.

Indonesia punya potensi itu pasti, tapi harus ada keseriusan dukungan regulasi dan implementasi. Hal ini penting agar tidak berujung wacana

**Ir. H. A. JUNAIDI
AULY, M.M**

Anggota Komisi XI DPR RI

PKS Dorong Perkembangan Ekonomi Halal di Indonesia

Lampung (13/12) – Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan ekonomi halal erti

makanan halal, keuangan Islam, produk halal, fashion dan pariwisata.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan perkembangan ekonomi halal di Indonesia masih belum semuanya tergarap dengan optimal, bahkan cenderung berkembang secara parsial.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, ekonomi halal dapat menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia punya potensi itu pasti, tapi harus ada keseriusan dukungan regulasi dan implementasi. Hal ini penting agar tidak berujung wacana". ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi tentang Ekonomi Halal bersama Bank Indonesia di Pasir Sakti, Lampung Timur (Jum'at, 13/12).

Berdasarkan State of the Global Islamic Eco



Junaidi Auly (tengah) bersama peserta Sosialisasi tentang Ekonomi Halal bersama Bank Indonesia di Pasir Sakti, Lampung Timur (Jum'at, 13/12)

nya Report dijelaskan bahwa sektor-sektor inti dari ekonomi Islam mewakili peluang pengeluaran konsumen sebesar \$2,2 triliun pada tahun 2018, diproyeksikan akan tumbuh menjadi \$ 3,2 triliun pada tahun 2024. Aset keuangan Islam diperkirakan sebesar \$ 2,5 triliun pada tahun 2018, dan diproyeksikan akan tumbuh hingga \$ 3,5 triliun pada tahun 2024.

Legislator PKS asal

Lampung ini menambahkan Jika ekonomi halal dikembangkan dengan baik tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ingat jangan terjebak menjadi pasar, tapi kita harus jadi produsen juga.

Pemerintah harus jeli dalam melihat peluang sumber pertumbuhan ekonomi dari ekonomi halal. Selain itu pelaku usaha harus aktif berperan dalam membangun ekosistem yang baik." tutup Junaidi.

Semua harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ke depan bisa dirumuskan lebih matang exit strategic apa yang diambil masing-masing daerah. Kalau memang harus diputus ini jadi pertimbangan, apa ke depan yang harus dilakukan,"

H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan dana Keistimewaan Yogyakarta akan segera berakhir. Pemerintah daerah dan pusat perlu memikirkan strategi akhir (exit strategic) dari pengalokasian dana ini. Apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan konsentrasi khusus ke satu bidang pembangunan di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Strategi Akhir Dana Otsus Harus Dipikirkan

(BAKN) DPR RI Ahmad. Syaikhu mengemukakan hal tersebut usai mengikuti pertemuan dengan para akademisi Universitas Udayana di Bali, Kamis (12/12/2019). "Karena dana ini tidak untuk selamanya, maka harus ada exit strategic. Harus dipersiapkan penyelesaiannya. Apa exit strategic yang akan dilakukan, apakah akan dievaluasi atau akan dihentikan," tukasnya.

Tim Kunjungan Kerja BAKN ke Kampus Udayana untuk menyerap pandangan atas pengalokasian dana Otsus dan keistimewaan yang selama ini digelontorkan bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan Yogyakarta. Menurut Syaikhu, perlu ada persiapan matang menghadapi akhir pengalokasian dana ini dari APBN. Misalnya, mungkin ke depan alokasi dana Otsus akan dikonsentrasikan saja untuk pendidikan, kesehatan, atau bidang lainnya agar lebih terarah.

"Semua harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ke

depan bisa dirumuskan lebih matang exit strategic apa yang diambil masing-masing daerah. Kalau memang harus diputus ini jadi pertimbangan, apa ke depan yang harus dilakukan," tutur politisi PKS ini. Ditambahkannya, dana Otsus dan keistimewaan ini harus memiliki master plan yang jelas, sehingga bisa terukur kegiatan apa saja yang hendak dilakukan pemerintah.

"Setelah ini kita akan memberi masukan yang lebih dalam pada pemerintah atau kita dalam lagi dengan pemerintah. Mungkin juga pemerintah sudah merumuskan exit strategic-nya. Kita ingin tahu dulu apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dana Otsus dan keistimewaan ini," tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (mh/sf)



Raih Democracy Achievement Award

HNW: Demokrasi Umat Islam Selamatkan NKRI

Tadinya (NKRI) sudah dikubur oleh Belanda sebagai RIS. Melalui mekanisme berdemokrasi M. Natsir Ketua Fraksi Partai Masyumi menyampaikan pada tahun 1950 dan kemudian kembalilah Indo menjadi NKRI

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua MPR RI

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mendapatkan penghargaan Democracy Achievement pada acara Moslem Choice Awards bertajuk "Umat Bersatu, Negara Maju" yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (12/12) malam. Penghargaan diberikan langsung oleh Pemimpin Umum

RMOL Network Teguh Santosa Acara tersebut juga sekaligus memperingati dua tahun Majalah Moeslim Choice yang notabene masih bagian dari RMOL Network.

Dalam kesempatan tersebut, Hidayat Nur Wahid menghaturkan terimakasih kepada Moslem Choice dan berharap agar tetap menorehkan kiprah yang gemilang di masa mendatang. "Terimakasih kepada Moeslim Choice dan mudah-mudahan semakin berkah dan semakin sukses kedepannya," ujar Hidayat dalam sambutannya.

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS itu kemudian menyinggung masalah peran umat Islam mengimplementasikan demokrasi dalam konteks berbangsa dan bernegara.

"Sesungguhnya bukti konkret umat Islam ketika memaksimalkan potensi berdemokrasinya melalui parlemennya bisa menyelamatkan Indonesia," kata HNW.

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sempat diubah oleh kolonial Belanda kala itu men-

jadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, NKRI akhirnya dapat kembali berlaku sedikit banyaknya berkat peran umat Islam khususnya Partai Masyumi sekitar tahun 1950-an lalu.

Kala itu, Ketua Fraksi Partai Masyumi M.Natsir melalui jalur parlemen bersama rekan-rekannya berupaya mengembalikan NKRI kembali.

"Sekali lagi tadinya (NKRI) sudah dikubur oleh Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat. Melalui mekanisme berdemokrasi Mochamad Natsir Ketua fraksi Partai Masyumi menyampaikan pada tahun 1950 dan kemudian kembalilah Indo menjadi NKRI," tuturnya.

Atas dasar itu, ia pun menyesalkan jika dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia masih ada pihak-pihak yang mengidap Islamophobia. Padahal, umat Islam telah banyak memperjuangkan demokrasi.

"Inilah yang seharusnya selalu kita jaga dan kita kuatkan peran serta daripada umat Islam di Indonesia ini, dalam bisa menyelamatkan NKRI," demikian Hidayat seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.



Berkat upaya Mulyanto beserta jajarannya di Inspektorat Jenderal kini program pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Pertanian menjadi acuan bagi kementerian lain secara nasional, yang diadopsi KPK dan Kemenpan-RB. Bahkan pada tahun 2009 Program WBK Kementerian Pertanian mendapat 2 Rekor MURI untuk kategori Pelopor Gerakan WBK dan Pelatihan Anti-Korupsi WBK.

Politikus PKS Raih Penghargaan Tokoh Pelopor Gerakan Anti-Korupsi

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (HAKORDIA), Jumat (13/12), di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian. Hadir dalam acara tersebut Sekjen, Irjen dan beberapa orang Dirjen lingkup Kementan serta Pimpinan Balai Kementerian Pertanian se-Indonesia.

Selain kepada Mulyanto, Kementerian Pertanian juga memberikan penghargaan yang sama kepada Ir. R. Azis Hldajat, MM., Erif Hilmi, SH., dan Drs. Imam Subarkah, MM.

Dalam sambutannya Syahrul Yasin Limpo menyatakan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan para tokoh WBK Kementerian Pertanian.

Atas usaha yang dilakukan

Atas usaha yang dilakukan

Jakarta (13/12) — Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian atas prakarsanya membangun gerakan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kementerian Pertanian saat masih menjabat sebagai Inspektorat Jenderal tahun 2008-2010.

Mulyanto dinilai layak menerima penghargaan tersebut karena berhasil membangun program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu di wilayah kerja Kementerian Pertanian yang dulu bernama Departemen Pertanian.

Berkat upaya Mulyanto beserta jajarannya di Inspektorat Jenderal kini program pencegahan dan



kini Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya Kementerian yang bebas dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Syahrul mengajak jajaran Kementerian Pertanian untuk meneruskan tradisi baik ini.

"Menjaga kementerian ini agar tetap bersih tidak bisa

WBK. Mulyanto bangga program yang diprakarsainya sepuluh tahun lalu masih dapat diteruskan, bahkan semakin baik. Mulyanto berharap apa yang sudah dicapai selama ini oleh Kementerian Pertanian dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Mulyanto berharap Kementerian Pertanian dapat menjadi pelopor terlaksanakannya konsep good and clean governance. Hal itu penting untuk menunjang produktifitas lembaga yang pada akhirnya dapat membantu Pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan, khususnya terkait komoditas pertanian.

"Malu kita kalau terkait komoditas pertanian masih harus impor. Apa kita mau seperti itu?" tanya Mulyanto yang dijawab serempak oleh peserta yang hadir. "Itu mengapa kita harus benar-benar menghayati bahwa kegiatan WBK ini tidak semata-mata kegiatan yang bersifat administratif melainkan kegiatan yg memiliki dampak ekonomi secara nasional," tegas Mulyanto.

hanya dibebankan kepada Menteri, Sekjen, dan Inspektorat Jenderal. Tapi komitmen ini harus dihayati bersama oleh segenap jajaran Kementerian Pertanian," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Sementara dalam sambutan pengantarnya, Mulyanto mengaku surprise ketika menerima undangan dari Kementerian Pertanian yang memintanya hadir sekaligus menerima penghargaan tokoh

Saya berharap semoga semua penghargaan ini merupakan sebuah pengingat, bahwa tantangan membangun kualitas SDM Indonesia yang dimulai sejak usia dini merupakan sebuah kegiatan penting yang mesti mendapat dukungan semua pihak

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota DPR RI Dapil Sumbar

Jakarta (13/12) -- Semangat membangkitkan bahwa ikan adalah protein yang mampu memberantas stunting di negeri ini, yang selalu disosialisasikan Nevi Zuairina sebagai ketua PW Himpaudi sumbar, Ketua TP- PKK Sumbar, Ketua Dekranasda Sumbar dan Anggota DPR RI Komisi VI, kini membuahkannya hasil

Sosialisasi yang dilakukan Nevi membuatnya meraih penghargaan Himpaudi Awards pada puncak acara HUT XIV Himpaudi dan Apresiasi Kreativitas Pejuang PAUD (AKPP) III Tahun 2019 Jumat, (13/12/2019).

Nevi yang dikenal kalangan aktivis Himpaudi Penggerak gemar ikan oleh ibu-ibu PKK dan pendidik PAUD se-Sumbar ini memang selalu menggalak-

BERITA FRAKSI

Fraaksi.pks.id | Jum'at 13 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI | c fraksi.pksdpr | t @fpksdpr | i fraisi.pks.id



Nevi Zuairina Terima Penghargaan Himpaudi Awards Tingkat Nasional



kan gemar makan ikan kepada seluruh ibu dan anak wilayah kerjanya dengan tujuan menghambat laju stunting.

Nevi terus berkeliling berkampanye agar konsumsi meningkat di seluruh anak di sumbar melalui jaringan sekolah-sekolah anak usia dini. saat ini, jumlah satuan pendidikan sekolah anak usia dini se-Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5,400 sekolah.

Nevi bergerak pada aktivitas para pembina anak-anak usia dini yang selalu mengkampanyekan "Aku Anak Indonesia Suka Makan Ikan". Sumber hayati ikan kita

melimpah dengan kandungan protein tinggi, seharusnya akan mampu memberi kontribusi untuk menghambat laju stunting di negeri ini.

"Alhamdulillah Selaku Bunda Paud Provinsi Sumatera Barat, Saya mengucapkan terimakasih kepada Himpaudi, serta kerjakeras semua pihak, masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan Himpaudi Award tingkat Nasional adalah untuk seluruh anak dan ibu di Sumbar. Semoga negara kita kedepannya, memiliki SDM yang berkualitas akibat asupan nutrisi cukup sejak dini. Terimakasih

Himpaudi", ucap Nevi.

Penerimaan penghargaan Himpaudi kepada Nevi Zuairina tertuang pada Surat Keputusan Himpaudi Award Tahun 2019 dengan nomor 016/KEP/PP HIMPAUDI/XII/2019.

Ada 10 propinsi penerima Himpaudi Award dimana ia mewakili Sumbar. Propinsi lain penerima Himpaudi Award antara lain Banten, Jawa Barat, Bengkulu, Aceh, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Kepri dan Papua.

Ia menambahkan, Himpaudi menganugerahkan untuk tingkat kabupaten kota sebanyak 36 daerah, untuk tingkat kecamatan sebanyak 7 dan tingkat kelurahan atau desa sebanyak 8.

"Saya berharap semoga semua penghargaan ini merupakan sebuah pengingat, bahwa tantangan membangun kualitas SDM Indonesia yang dimulai sejak usia dini merupakan sebuah kegiatan penting yang mesti mendapat dukungan semua pihak", ucap dia.



Tahniah



DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.
Wakil Ketua MPR RI

Menerima anugerah *Democracy Achievement Award* dari *Moslim Choice*. RMOL Network



DR. H. MULYANTO, M.ENG
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian RI berkat prakarsanya membangun gerakan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



HJ. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI

Menerima Penghargaan Himpaudi Awards Berkat upayanya membe-rantas stunting, yang selalu disosialisasikan sebagai ketua PW Himpaudi sumbar, Ketua TP-PKK Sumbar, Ketua Dekranasda Sumbar

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Selamat Hari **ANTI KORUPSI** *Internasional*

09 DESEMBER 2019



Cegah Korupsi dari diri sendiri.
Agar Negeri Bermartabat,
Rakyat Sejahtera

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Hari Anti Korupsi Sedunia

PKS Kawal KPK Jadi Lembaga Kuat, Independen dan Bermartabat.

Demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak mengizinkan satu pun orang atau satu pun lembaga menjadi kekuatan super body yang tidak terkontrol. Apalagi sampai jadi 'momok' buat yang lain,

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (09/12) — Setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani mengatakan momentum ini perlu dimaknai sebagai upaya terus menerus dan tidak boleh berhenti melawan kejahatan korupsi. Sebab korupsi adalah musuh bersama, bahaya laten yang dampaknya

menyengsarakan rakyat.

Netty mengapresiasi rangkaian kegiatan yang dilakukan KPK dalam membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi dengan pendekatan humanis kepada masyarakat seperti melalui musik, dongeng, jalan santai, penghargaan utk Jurnalis Anti Korupsi, festival media digital, dan lain-lain.

Menurut Netty, upaya yang dilakukan KPK sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang tahun ini naik 1 poin menjadi 38. Sebagaimana data yang dilansir TII, Indonesia menduduki peringkat ke 89 (sebelumnya 96) dari 180 negara di dunia dan peringkat 4 di ASEAN, Masih di bawah Singapura, Brunei dan Malaysia.

"Indonesia jangan berpuas diri dulu atas capaian tersebut. Kita masih jauh tertinggal dari Singapura yang IPK-nya 85. Oleh sebab itu, saya berharap KPK tidak berhenti pada sebatas selebrasi dan seremonial Hakordia. Maknai momentum ini sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan

memberantas korupsi", ungkap Netty.

Menurut Netty, KPK perlu terus melakukan pembenahan internal agar kemelut yang terjadi di tubuh KPK, yang sempat mencuat ke publik, tidak terjadi lagi.

"KPK harus memastikan berdiri di atas semua kepentingan politik dan golongan dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Netty mengingatkan bahwa nama KPK pernah harum hingga mendapat pembelaan rakyat. Namun, kata Netty, janglahal hal tersebut membuat KPK seolah tak bisa dan tak mau diatur.

"Demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak mengizinkan satu pun orang atau satu pun lembaga menjadi kekuatan super body yang tidak terkontrol. Apalagi sampai jadi 'momok' buat yang lain," tegas Netty.

Netty berharap tugas pemberantasan korupsi sebagai bahaya laten bangsa, musuh rakyat, harus mampu diaman KPK dengan penuh integritas, independensi, transparansi, dan tidak

tebang pilih. Selain itu, KPK juga harus membangun sinergi dengan banyak pemangku kepentingan agar korupsi yang seolah sudah mengurat mengakar di negeri ini dapat diberantas dengan upaya kolektif.

"KPK tidak dapat berjuang sendirian. Partisipasi dan pelibatan segenap elemen masyarakat adalah hal mutlak," tuturnya.

Terlebih, kata Netty, dalam era informasi ini, dimana segala informasi sangat mudah di dapat, hak masyarakat untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan KPK perlu dipenuhi secara jujur dan transparan.

Sebagai Wakil Ketua FPKS, Netty mengatakan, FPKS berko

mitmen mengawal KPK menjadi lembaga pembe-rantasan korupsi yang kuat, independen dan bermartabat sejalan dengan konstitusi.

Selamat Hari Anti Korupsi se-Dunia !



KPK pada era reformasi sangat kuat, namun pada pemerintahan sekarang terlihat lemah. KPK perlu mengungkap selain kasus-kasus kecil, kasus besar juga perlu serius ditangani, sehingga pamor KPK akan semakin menguat

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah untuk dijadikan komitmen untuk mengurai kasus korupsi besar yang masih menggarjal hingga hari ini sekitar 18 kasus sejak pemerintahan periode lalu.

Melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Namun pada 2019 ini, KPK tidak segarang 5 tahun lalu yang banyak

Hari Anti Korupsi Sedunia

Indonesia Sebaiknya Mampu Mengurai Berbagai Kasus Korupsi Besar

mengungkap kasus-kasus Besar. Belasan Kasus Besar yang tidak terurai hingga hari ini oleh KPK masih perlu menjadi perhatian oleh pemerintah sehingga menjadi alasan kuat agar lembaga anti korupsi ini bertindak sesuai prosedur dan kuat secara hukum.

"Saya mendorong kepada pemerintah, bisa melalui KPK, untuk mengungkap kasus besar korupsi yang melanda negeri ini seperti kasus Impor Beras. Yang terbaru adanya pencopotan dirut garuda. Itu semua yang tampak hanya permukaan saja, perlu pendalaman sehingga terang benderang segala permasalahan yang terjadi", urai Nevi.

Untuk kasus beras, berawal dari rencana Bulog membuang 20 ribu ton beras busuk dari gudang, berawal sebagai pertanyaan yang mesti dipecahkan satu persatu. Kajian matang dalam pemberi izin impor pada satu tahun terakhir terlihat tidak dilakukan. Saat ini yang muncul di permukaan adalah tidak tersalurkan sebanyak 20 ribu ton atau senilai Rp 160 miliar.

Legislator Sumbar ini mengatakan, bila kasus impor beras ini di urai satu-per satu, akan terlihat seberapa tingkat penyelewengan pada kasus beras impor ini. Pemerintah akan bisa memberi pertanggungjawaban di depan publik kejadian yang sebenarnya kasus impor beras yang terjadi masif, dimana musim panen sangat gencar pada kurun 2018 dan 2019.

Sedangkan untuk kasus pencopotan dirut Garuda, berawal dari penyelundupan Harley, yang berujung pada pencopotan dirut Garuda. Pencopotan ini membuat gembira para asosiasi pariwisata Indonesia. Kegembiraan dibalik penderitaan Dirut Garuda yang dicopot merupakan sebuah sinyal, ada kasus besar dibalik ini yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Politisi PKS ini menyerukan kepada pemerintah, pada moment hari anti korupsi sedunia hari ini, minta dijadikan komitmen, agar berbagai skandal korupsi mulai dari kasus kecil hingga besar dapat diselesaikan. Menurutny,



instrumen pencegahan akan lebih baik dari pada penindakan setelah kejadian. KPK pada era reformasi sangat kuat, namun pada pemerintahan sekarang terlihat lemah. KPK perlu mengungkap selain kasus-kasus kecil, kasus besar juga perlu serius ditangani, sehingga pamor KPK akan semakin menguat.

"Berbagai kasus besar korupsi ini, bila mau ditangani

serius, DPR buat Pansus, KPK menyelidiki, BPK menelusuri dan kejaksan melakukan penyelidikan bersama kepolisian. Kasus Beras Impor hingga kasus kartel Garuda perlu di selesaikan dan semoga pemerintah mampu membuktikannya", pungkas Nevi Zuairina.

Foto : dpr.go.id

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

9 DESEMBER 2019

Demokrasi yang sehat dan bermartabat tidak mengijinkan satu pun orang atau satu pun lembaga menjadi kekuatan super body yang tidak terkontrol. Apalagi sampai jadi 'momok' buat yang lain,

**Dr. Hj. NETTY
PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

KPK pada era reformasi sangat kuat, namun pada pemerintahan sekarang terlihat lemah. KPK perlu menangkap selain kasus-kasus kecil, kasus besar juga perlu serius ditangani, sehingga pamor KPK akan semakin menguat

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi IX DPR RI





setiap warga negara yang baik pastinya harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

KH TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (11/12) — Menyambut Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada tanggal 10 Desember Anggota Komisi 1 dari Fraksi PKS DPR RI, Thoriq Hidayat menyatakan dalam tradisi Islam, pembicaraan tentang hak selalu berkaitan dengan kewajiban.

"Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan", terang Thoriq.

Dalam persepektif ini Thoriq berpendapat sebagian masyarakat belum memahami ini, sehingga banyak berbicara soal hak asasi, tapi acapkali lupa soal kewajiban asasi.

"terkait HAM ada perbedaan sudut pandang antara pemikiran keislaman dengan pemikiran barat. Karena bicara hak dalam Islam selalu berkaitan dengan

Sambut Hari HAM Sedunia, Antara Hak dan Kewajiban Asasi

kewajiban," tuturnya.

HAM atau sering disebut hak asasi manusia, lanjut Thoriq telah melekat pada diri setiap manusia dari sejak awal dilahirkan, dan berlaku selama manusia itu hidup serta tak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

"Melanggar hak asasi manusia termasuk suatu hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena telah kita ketahui bahwa hak asasi manusia yang dianut di Indonesia berdasarkan asas Pancasila", ungkap Thoriq.

Maka dari itu, Thoriq menyampaikan setiap warga negara yang baik pastinya harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

"Di Indonesia, hak asasi manusia sendiri mempunyai wadah yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu disebut dengan Komnas HAM.

amun, kita bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak mempraktekan HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Kita masih bisa melihat belakangan ini banyak terjadi perselisihan

dan penyimpangan dan hal tersebut bisa merujuk kepada konflik dan perpecahan", pungkasnya.

Hak berpendapat, menurut Thoriq, dalam sebuah unjuk rasa yang tidak hanya bersuara namun acap kali menimbulkan aksi yang merugikan masyarakat umum.

"Penyalahgunaan media sosial juga sebagai ajang sarana untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Dari sini bisa kita ambil sebuah pertanyaan, apakah itu semua hak asasi yang dibenarkan?", tanya Thoriq.

Sebenarnya unjuk rasa dan bersosial media kata Thoriq, merupakan salah satu hak asasi setiap orang karena mereka mempunyai hak dasar untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing asalkan harus taat dan patuh dengan peraturan yang berlaku dan harus sesuai dengan koridor hukum.

"Menghindari tindak kekerasan, bentrok dengan polisi dan mengganggu kepentingan umum. Karena meski kita berالasan memiliki hak berpendapat tetapi jangan melupakan sesuatu yang lebih

penting dari itu yaitu mengganggu hak pribadi masyarakat umum lainnya", terangnya.

Lebih lanjut Thoriq menjelaskan Menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai alasan untuk melakukan perbuatan yang di anggap benar namun kenyataannya jelas-jelas salah adalah pelanggaran HAM yang sangat berat.

"Kedepan sudah sepatut jajaran Aparatur Negara memberikan pemahaman tentang HAM secara integral kepada seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat. Karena ini menjadi tanggung jawab yang harus diemban pemerintah untuk melindungi hak keamanan, hak hidup, hak beragama, hak mempertahankan kehidupan dan hak ketertiban umum warga negaranya", pungkasnya.

Thoriq juga mengingatkan bahwa setiap manusia juga memiliki kewajiban lain yakni kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusi ialah dengan

menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya.

"Hak untuk hidup, kebebasan, dan kebahagiaan manusia dapat terjamin dan terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain, maka Negara akan aman dan rukun dan cita-cita Pancasila yg aktual akan terwujud di negara kita", tutup Thoriq.





Setelah sah menjadi warisan dunia, mestinya Silek menjadi komoditi handal sektor pariwisata dan berbagai sektor lainnya, saya berharap seni tradisi kita ini mendatangkan Wisman ke sumbar, dalam kontek belajar silek

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota DPR RI Dapil Sumbar

Silek Jadi Warisan Dunia, Kebanggaan sekaligus Tantangan

Jakarta (13/12) — Begitu tahu silat atau silek (di Minangkabau dikenal), menjadi warisan dunia tanpa benda oleh Unesco-PBB, Anggota DPR RI asal Sumbar Nevi Zuairina mengatakan itu kebanggaan sekaligus tantangan bagi anak bangsa.

"Bersyukur wajib ya, bangga udah pasti lah, silek budaya tradisi anak negeri. Kini silek kita dijaga keluhurannya oleh Unesco-PBB," ujar Nevi Zuairina kepada media ini Jumat 13/12 subuh.

Seperti diinfokan lewat instagram Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Unesco PBB pada sidang khususnya di Bagota Kolombia dihadiri utusan Republik Indonesia termasuk Irwan Prayitno, menetapkan silat menjadi warisan dunia tanpa benda, Kamis 12/12 pukul 08.59 waktu Bagota.

Tapi kata Nevi tantangan-nya pasti ada pasca sahnya Silat jadi warisan dunia.

"Setelah sah menjadi warisan dunia,

mestinya Silek menjadi komoditi handal sektor pariwisata dan berbagai sektor lainnya, saya berharap seni tradisi kita ini mendatangkan Wisman ke sumbar, dalam kontek belajar silek," ujar Nevi.

Atau secara berkala ada festival silek di Sumbar yang menjadi magnet magnet turis asing melihatnya

Dan silek kata Nevi harus mentra disi

dan bertaahan dari rongrongan kemajuan zaman.

"Saya desak Pemprov Sumbar untuk menjadi-kan silek ekstarakurikuler wajib siswa-siswi SMA di Sumbar," ujar Nevi.

Foto : dpr.go.id /
Background:
istimewa



BANJIR RIAU

Syahrul Aidi Prihatin Dengan Kondisi Korban Banjir

Jangan sampai terjadi sembakو putus, ada yang tidak makan. Titik tanggap darurat juga diisi dengan dapur umum. Ini harapan kita.

**H. SYAHRUL
AIDI MAAZAT,
Lc., M.A**

Anggota DPR RI Dapil Riau II

Riau (14/12) – Musibah banjir beberapa hari ini kembali menimpa sejumlah kabupaten di Riau. Saat ini, yang terparah dialami oleh Kabupaten Kampar dan Pelalawan, tempat aliran sungai Kampar yang sedang meluap.

Kondisi banjir dialami warga di pinggiran sungai Kampar dalam 3 hari terakhir. Berbagai proses penyelamatan dilakukan oleh Pemkab Kampar, seperti membuka

dapur umum dan tenda darurat, hingga menurunkan personel penyelamatan.

Kondisi ini turut dirasakan anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, dengan salah satu mitra kerjanya Basarnas, selaku regu penyelamatan tingkat nasional.

Syahrul Aidi yang didampingi oleh Basarnas, BPBD Kampar, dan Tagana Kampar menyusuri aliran sungai Kampar, dan melihat kondisi terkini akibat banjir, Sabtu, (14/12/2019).

"Kita sangat prihatin atas bencana banjir ini yang menimpa warga Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Banjir sungai Kampar ini terjadi tiap tahun. Memang kondisi alam yang memaksanya. Kita berharap masyarakat tabah dan sabar menghadapi cobaan ini" terang Syahrul Aidi.

Walaupun tidak ada korban jiwa hingga sekarang, namun kebun-kebun warga yang rendah, terendam oleh banjir. Tentunya ini merugikan para petani. Mereka akan gagal panen.

"Ancaman yang nyata saat ini adalah gagal panen.



Masyarakat yang menanam padi dan palawija. Selain itu, aktifitas masyarakat banyak yang terganggu. Kita berharap bencana ini cepat berakhir" harapnya.

Syahrul Aidi mengharapkan Pemkab Kampar dan Pemprov Riau agar menseriisi penanganan banjir ini. Selain jangan sampai ada korban jiwa, juga pelayanan terhadap kebutuhan

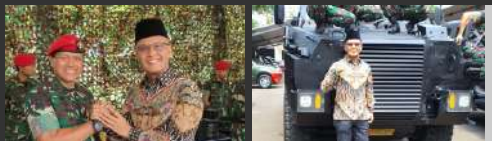
masyarakat saat banjir.

"Jangan sampai terjadi sembakو putus, ada yang tidak makan. Titik tanggap darurat juga diisi dengan dapur umum. Ini harapan kita." harapnya lagi.

Syahrul Aidi beserta tim memulai penyusuran dari Bangkinang, kemudian singgah di Pulau Jambu Kecamatan Kampar. Pulau Jambu ini tergolong parah karena sebagian besar wilayahhna

berada di wilayah terdampak banjir.

Setelah dari Pulau Jambu, Syahrul Aidi meneruskan perjalanan ke Desa Pulau Rambai yang wilayahnya dikelilingi oleh sungai Kampar.



MENINJAU KESIAPAN TEMPUR TNI

Bersama Komisi 1 DPR RI rapat di Markas Kopassus Cijantung sekaligus melihat dari dekat kondisi dan kesiapan pasukan khusus yg dimiliki TNI yang menjadi kebanggaan bangsa

Indonesia. Kami di Komisi 1 terus mendorong peningkatan profesionalitas, kapasitas dan adaptabilitas pasukan serta kesejahteraan prajurit Kopassus.



RDP Komisi IX dengan Kemenkes

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar dan Anggota Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati dan Netty Prasetyani turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kemenkes RI

dan BPJS pada Kamis (12/12) . Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa komisi 9 DPR RI telah bersepakat dengan Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan untuk tidak menaikkan iuran kelas III Mandiri.

BAKN di Unair



Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhul bersama Tim menggelar pertemuan dengan Civitas Akademika Universitas Airlangga, Surabaya, dalam rangka meminta masukan terkait tugas dan fungsi BAKN DPR RI, Jumat, 13 Desember 2019.

BAKN kunker ke Bali



Wakil Ketua BAKN DPR RI Ahmad Syaikhul bersama Tim Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar pertemuan dengan Civitas Akademika Universitas Udayana, Bali, Kamis, 12 Desember 2019.

RDPU korban PHK



Komisi IX DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Karyawan PHK Sepihak PT. Free Port Indonesia Privatisasi, Kontraktor, dan Sub Kontraktor, SP.UB Jastasma

Serikat Buruh Anggota FSPBI, dan Serikat Pekerja PT. Jasa Marga, Kamis, 12 Desember 2019. #Komisi9

RDPU Komisi VIII



Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tamhid hadir saat RDP Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI dan RDPU dengan Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional membahas aspirasi tentang Penyelenggaraan Acara Pesparani Tahun 2020, Rabu, 11 Desember 2019. #Komisi8

RDPU Komisi VIII



Anggota Komisi VIII KH Bukhori hadir RDP Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah membahas Rincian dan Besaran Komponen BPIH Tahun 1441 H/ 2020 M, Selasa, 10 Desember 2019. #Komisi8

Kunspek Komisi X



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pendidikan vokasi dan SMK di Kabupaten Bogor, Senin, 9 Desember 2019. Tim Kunspek Komisi X DPR RI juga berdiskusi dengan Wakil Bupati Kab. Bogor Iwan Setiawan dan jajaran yang termasuk pejabat cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor. #KunkerDPR

Kunker ke Sumut



Nasir Djamil bersama Tim Kunspek Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kapolda dan Kakanwil KemenkumHAM Sumatera Utara dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Rabu, 4 Desember 2019.

BAKN di Unair



Komisi VI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian membahas Program Kerja dan Anggaran K/L TA. 2020 dan Target Penyelesaian Roadmap K/L, Senin, 9 Desember 2019.



MINIATUR SURGA

Bernama Keluarga

Sahabat Fraksi PKS, Alhamdulillah kami telah melaksanakan Rakernas pada tanggal 4 dan 5 Desember kemarin. Program telah dibuat, dirumuskan dan siap diperjuangkan. Seluruh Anggota Legislatif PKS siap mengambil peran penting dalam keputusan di Parlemen, juga menjadi garda utama mengoreksi segala kebijakan yang tidak berpihak

kepada rakyat.

Salah satu punggawa adegan yang ada di Komisi I adalah KH. Toriq Hidayat, Lc tokoh karismatik dari Tasikmalaya. Izinkan kami memperkenalkan beliau dan #keluargaPKS kepada sahabat semua.

KH Toriq lahir di Tasikmalaya, 19 Januari 1955. Menjadi anggota DPR RI pertama kali saat menjadi Pengganti Antar

bertemu konstituen, juga waktu yang berharga bercengkrama bersama keluarga.

Pak Kyai menyadari peran Ayah tidak boleh hilang dalam proses ketahanan keluarga. Karenanya kesibukan sebagai Anggota DPR tidak menyurutkan komunikasi dan perhatian kepada Keluarga.

Rumah yang kokoh tidak bisa berdiri megah jika tidak didukung struktur fondasi, pasir, batu, besi dan semen. Meski tidak terlihat namun menentukan. Demikian pula dalam satu negara.

Negara tidak akan menjadi baik jika pranata terkecil keluarga tidak dikelola dengan baik.

"Keluarga adalah rahim peradaban. Maka sudah seharusnya sebuah keluarga, bukan hanya melahirkan anak, tapi juga melahirkan generasi yang berprestasi membangun peradaban. Juga keluarga adalah miniatur kebahagiaan surgawi. Maka, berkeluargaalah dengan akhlak2 penghuni surga. Agar dengannya, kita mampu membangun jannah berjembatan rumah, menuju surga berperantara rumah tangga."

Untuk mengetahui segala aktifitas Pak Kyai Toriq dapat melihat di sosial mediana:
Facebook : KH. Toriq Hidayat, Lc
Instagram : @toriqhidayatofficial

Pesan untuk keluarga Indonesia:

Waktu (PAW) pada tanggal 30 Mei 2017 saat Sohibul Iman ditunjuk sebagai Presiden PKS.

Berangkat dari Dapil Jawa Barat 11, daerah kelahirannya Tasikmalaya. Sarjana lulusan Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Riyadh ini menapak jalur politik dengan tenang dan bersahaja.

Pak Kyai bersama istrinya solihah mendidik 6 anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat, namun demikian tetap mengakar kuat kearifan lokal. Anak terdiri dari 3 putra , 3 putri, 3 mantu dan 7 cucu.

Akhir pekan selain

”
Berkeluargalah dengan akhlak penghuni surga. Agar dengannya, kita mampu membangun jannah berjembatan rumah, menuju surga berperantara rumah tangga



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI